

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banjir yang melanda beberapa daerah di wilayah Indonesia selalu dikaitkan dengan aktifitas pembabatan hutan (illegal logging) di kawasan hulu dari sistem daerah aliran sungai (DAS). Namun, sesungguhnya penebangan dan pengelolaan hutan yang terbatas tidak begitu saja dapat mengganggu sistem pengaturan air maupun sistem keseimbangan air. Kecuali kalau dilakukan secara besar-besaran pembudidayaan hutan menjadi ladang, lahan pertanian atau permukiman yang disertai dengan pemadatan tanah dan erosi yang berat, sehingga tidak memberi kesempatan air hujan untuk meresap ke tanah dan akhirnya menjadi aliran air permukaan dengan pelumpuran.

Hujan akan mengikis tanah di DAS yang gundul. Material tanah yang tererosi itu kemudian akan hanyut terbawa air hujan dan mengendap di dasar sungai. Berkurangnya daya serap liputan vegetasi DAS dan menurunnya daya tampung badan sungai karena sedimentasi serta adanya daerah bantaran sungai yang padat dengan rumah-rumah merupakan faktor yang mendukung terjadinya banjir. Banjir umumnya terjadi di dataran yang merupakan hilir dari suatu sistem DAS yang memiliki aliran rapat. Dataran yang menjadi langganan banjir umumnya memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Secara geologis, umumnya merupakan lembah (atau bentuk cekungan bumi lainnya) serta daerah yang mempunyai porositas rendah baik dataran delta maupun aluvial. Banjir jenis lain adalah banjir bandang, yaitu banjir yang datang tiba-tiba dengan membawa

lumpur dari wilayah hulu. Wilayah ini merupakan dataran yang berada dikaki-kaki pegunungan terjal maupun kaki gunung api.

Bencana banjir yang sering terjadi di dataran sekitar Ci Tarum merupakan bencana rutin tiap tahunnya. Bencana banjir ini diakibatkan oleh meluapnya DAS Ci Tarum hulu, sebagai sungai utama yang melalui daerah ini. Meluapnya air Ci Tarum, selain dikarenakan tingginya curah hujan didaerah hulu sungai juga dipengaruhi oleh topografinya yang landai sebagai daerah cekungan yaitu cekungan Bandung. Cekungan Bandung yang meliputi wilayah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung serta Kabupaten Sumedang, merupakan danau purba yang mengering ketika Gunung Tangkuban Parahu meletus, ditengahnya terletak Ci Tarum yang sumber airnya berasal dari daerah Gunung Wayang. Selain itu, sungai ini juga merupakan sumber pelimpahan dari seluruh sungai yang menjadi bagian atau sub DAS-nya diantaranya : Ci Rasea, Ci Tarik, Ci Keruh, Sub Daerah Aliran Kopo, Ci Bodas, Ci Durian, Ci Kapundung, Ci Sangkuy, Ci Jalupang, Ci Widey, Ci Beureum dan Ci Mahi. Selain diakibatkan pula oleh rusaknya hutan di daerah hulu sungai, bencana banjir ini juga disebabkan oleh semakin padatnya pemukiman dan aktivitas industri disepanjang bantaran banjir.

Wilayah Kecamatan Majalaya beriklim tropis yang dipengaruhi oleh angin muson dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 1500 sampai dengan 4000 mm /tahun, suhu rata-rata berkisar antara 19°C sampai dengan 24°C. Sedangkan untuk kelembaban berkisar antara 65 - 92 %. karakteristik topografi Kecamatan Majalaya merupakan dataran rendah. Kecamatan Majalaya berada pada ketinggian 676 m dpl. Majalaya tersusun oleh batuan hasil kegiatan gunung api. Berbagai

macam batuan dikelompokkan ke dalam satuan-satuan batuan berdasarkan satuan stratigrafi gunung api termasuk sumber erupsi gunung api yang menghasilkannya (Martodjojo dan Djuheni, 1996). Majalaya termasuk pada Cekungan Bandung yang di dominasi oleh batuan sedimen yaitu sedimen laut (marine). Batuan sedimen merupakan batuan yang lunak yang berubah menjadi padat yang mempunyai sifat berlapis.

Faktor penyebab banjir di Ci Tarum hulu berasal dari faktor alam dan lebih besar diakibatkan oleh faktor manusia yaitu tumbuhnya daerah-daerah pemukiman dan kegiatan baru didaerah dataran banjir . Kegiatan gali atau timbun dan pemotongan lereng untuk pembangunan, serta pengolahan tanah untuk pertanian telah mengakibatkan penggemburan tanah dan menurunkan kemantapan tanah/batuan. Lahan berubah menjadi daerah yang kurang dapat meresapkan air karena tertutup oleh bangunan villa, hotel, dan perumahan, terutama pada musim hujan, telah terjadi peningkatan air limpasan permukaan (*run off*) yang langsung masuk ke badan sungai. Tanah pelapukan dan batuan menjadi bersifat mudah runtuh, sehingga di banyak tempat terjadi gerakan tanah dan erosi. Material hasil erosi dan gerakan tanah tersebut terangkut dan mengalir masuk ke badan sungai dan mengakibatkan peningkatan sedimentasi/pelumpuran dan pendangkalan pada badan sungai. Terutama di wilayah hilir, selama musim hujan badan sungai tidak mampu menampung air permukaan, sehingga air meluap menjadi banjir.

Teknologi untuk menghilangkan bencana atau mencegah terjadinya ancaman bahaya jelas belum bisa dikuasai manusia, maka upaya yang dapat dilakukan adalah mengurangi akibat-akibatnya yaitu Penataan permukiman

kawasan banjir. Tidak hanya menyangkut penanganan kawasan hulu Ci Tarum yang rusak, akan tetapi juga diperlukan adanya penataan ruang disepanjang aliran sungai, terutama yang dijadikan sebagai tempat terakumulasinya pemukiman dan industri.

Sejak musim hujan November 2008, Kecamatan Majalaya di Kabupaten Bandung telah 17 kali dilanda banjir dengan ketinggian air bervariasi. Banjir terakhir di Majalaya berlangsung pada Minggu (19/4) 2009 malam. Namun, penanganan banjir yang dilakukan sukarelawan tanggap bencana dan pemerintah setempat baru sebatas evakuasi warga.

Menurut keterangan warga, Senin, Sungai Citarum dan anak sungainya mulai meluap pukul 17.00 dan mencapai puncaknya pukul 21.00. Sementara di Pos Pemantauan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat mencapai 433 cm. Berdasarkan data Garda Caah, sukarelawan tanggap bencana banjir di Majalaya, wilayah yang tergenang banjir pada Minggu malam itu meliputi Desa Majalaya, Majasetra, Majakarta, dan Sukamaju.

Rumah warga yang tergenang diperkirakan mencapai 4.000 unit dengan ketinggian air 70 sentimeter sampai 1,9 meter. Namun, tak ada warga yang mengungsi karena genangan air hanya terjadi kurang dari 8 jam.

"Langkah yang diambil Pemerintah Kecamatan Majalaya adalah koordinasi untuk mengantisipasi banjir, evakuasi warga pada saat banjir, dan penanganan lumpur yang terbawa banjir di permukiman pascabanjir," kata Sekretaris Kecamatan Majalaya Lili Sadeli. (BANDUNG, KOMPAS)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada daerah banjir yang ada di Kecamatan Majalaya, tepatnya di desa Majalaya, Majasetra, Majakerta, dan Sukamaju yang digunakan untuk lahan permukiman.

Fokus peneliti pada lahan permukiman disebabkan Ci Tarum cukup berbahaya untuk di tempati oleh manusia, karena akan terus menerus di landa banjir tetapi tetap dipilih sebagai lahan permukiman. Maka permasalahan yang diajukan penulis adalah

- a. Bagaimanakah perbandingan peruntukan lahan antara kondisi eksisting (nyata) lahan permukiman dengan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Bandung?
- b. Bagaimanakah arahan pengembangan tata ruang permukiman di Kecamatan Majalaya yang berkelanjutan ?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk;

- a. Mengetahui perbandingan peruntukan lahan antara kondisi eksisting (nyata) lahan permukiman dengan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Bandung.
- b. Mengetahui bagaimana arahan pengembangan tata ruang permukiman di Kecamatan Majalaya yang berkelanjutan.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat memberikan masukan kepada semua pihak atau instansi yang terkait sebagai bahan rujukan untuk dimanfaatkan dalam upaya penataan ruang kawasan banjir Majalaya.
2. Dapat menambah wawasan dan pemahaman dalam penerapan konsep dan teori geografi dengan kenyataan di lapangan.
3. Bagi pemerintah, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkenaan dengan wilayah-wilayah yang memiliki bahaya banjir yang cukup tinggi agar keseimbangan sumber daya alam dapat terjaga.
4. Bagi penduduk setempat dapat dijadikan sebagai bahan masukan mengenai bahaya banjir.
5. Sebagai sumber data bagi penelitian lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

1.5 Definisi Operasional

Berdasarkan judul yang ada yaitu **“Penataan Ruang Permukiman Kawasan Banjir Di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung”**, penulis ingin menjelaskan beberapa istilah mengenai judul dan permasalahan dalam penelitian ini untuk menjaga agar tidak keluar dari batasan-batasan permasalahan.

Sehingga penulis menggunakan definisi operasional mengenai judul tersebut sebagai berikut :

1. Rencana Umum Tata Ruang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yaitu penyusunan rencana tata ruang harus memperhatikan keterkaitan antarwilayah, antarfungsi kawasan, dan antarkegiatan kawasan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan sebagai subsistem rencana tata ruang wilayah diatur dengan peraturan pemerintah.

Rencana umum tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana rinci tata ruang disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok peruntukan. Penyusunan rencana rinci tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan peraturan zonasi. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

2. Penataan Ruang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga

diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang. Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi system wilayah ruang nasional secara keseluruhan, pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu system keterpaduan sebagai ciri utama. Hal itu berarti perlu adanya suatu kebijakan nasional tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.

3. Kawasan Banjir

Kawasan banjir adalah wilayah yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana banjir. Banjir berkaitan dengan curah hujan dan waktu merupakan fenomena alam yang agak sulit dikendalikan, tetapi pemanfaatan lahan merupakan fenomena alam yang dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Karena itu pemanfaatan lahan harus memperhatikan kaidah lingkungan, sehingga lingkungan fisik dapat memberikan hasil dan kenyamanan bagi penduduk untuk tinggal. Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai akan memberikan dampak terhadap terjadinya masalah, karena perubahan pada wilayah secara fisik seolah-olah memutus mata rantai lingkungan yang sudah serasi.

4. Permukiman

Permukiman adalah bagian permukaan bumi yang dihuni manusia meliputi segala prasarana dan sarana yang menunjang kehidupannya dan menjadi satu kesatuan dengan tempat tinggal yang bersangkutan (Nursid Sumaatmajda 1988;191)

Jadi dalam permukiman lebih baik bila dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan atau yang dikenal dengan konsep pembangunan perumahan terarah (pengembangan pembangunan perumahan atau permukiman baru secara terarah,1990) konsep pembangunan perumahan terarah disebutkan sebagai suatu konsep yang menyediakan tanah untuk perumahan, lengkap dengan prasarana dan sarana dalam suatu lingkungan yang layak, terencana dan sehat.

1.6 Bagan Alur Peneliti

